

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA WAKORAMBU  
KECAMATAN BATALAIWORU KABUPATEN MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

La Ode Muhammad Andal Hasrin  
NPP.29.1593

*Asdaf Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara  
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: 29.1593@praja.ipdn.ac.id

***ABSTRACT (in english)***

***Problem/Background (GAP):*** The government issued a policy as a form of overcoming the economic crisis among the poor, one of which is the BLT-DD Program, the BLT-DD Program is expected to reduce the burden of KPM spending in meeting basic needs. ***Objective:*** This study aims to describe the supporting and inhibiting factors as well as efforts to optimize the implementation of the BLT-DD Program in Wakorambu Village, Batalaiworu District, Muna Regency, Southeast Sulawesi Province. ***Methods:*** This study uses a qualitative descriptive method that describes the current state of the object of research. Sources of data using primary and secondary data sources with data collection techniques using interview observations and documentation. ***Results/Findings:*** The results of the study indicate that the supporting factors for the implementation of the distribution of the BLT program are (1) Policy Logic covering the objectives of BLT-DD and the legal basis, (2) The environment in which the Policy is located includes the Social, Political, Economic, Defense and Security environment, as well as Geography, and for the inhibiting factors, namely (1) the ability and skills of the distribution team that are still not maximized in the service implementation of the BLT-DD distribution program, (2) the lack of targeting in the collection of BLT-DD recipients. ***Conclusion:*** In the distribution of BLT-DD, the government's efforts were made provide training and learning to improve skills and abilities for the distribution team, and conduct re-collection of the names of BLT-DD recipients carried out before the implementation of BLT-DD so that data collection can be optimized and evenly distributed for the people of Wakorambu Village. ***Keywords:*** Policy Implementation, Village Fund Direct Cash Assistance Program

## ABSTRAK (in bahasa)

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pemerintah mengeluarkan Kebijakan sebagai bentuk mengatasi krisis ekonomi dikalangan masyarakat miskin salah satunya adalah Program BLT-DD, Program BLT-DD ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM dalam pemenuhan kebutuhan pokok. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat serta upaya untuk mengoptimalkan implementasi Program BLT-DD d Desa Wakorambu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan keadaan objek penelitian di masa sekarang. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan Teknik pengumpulan data menggunakan observasi wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor pendukung implementasi penyaluran program BLT yaitu (1) Logika Kebijakan meliputi tujuan BLT-DD dan dasar hukum, (2) Lingkungan tempat Kebijakan meliputi lingkungan Sosial, Politik, Ekonomi, Pertahanan dan Keamanan, serta Geografi, dan untuk faktor penghambatnya yaitu (1) kemampuan dan keterampilan para tim penyalur yang masih belum maksimal dalam pelayanan imlementasi program penyaluran BLT-DD, (2) ketidak tepat sasaran dalam pendatan penerima BLT-DD.. **Kesimpulan:** Dalam penyaluran BLT DD dilakukan upaya pemerintah memberikan pelatihan dan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan bagi tim penyalur, dan melakukan pendataan ulang terkait nama penerima BLT-DD yang dilakukan sebelum jauh hari pelaksanaan BLT-DD agar pendataan bisa dioptimalkan serta merata bagi masyarakat Desa Wakorambu.

**Kata kunci:**Implementasi Kebijakan, Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada Kesehatan masyarakat, tetapi juga pada situasi sosial dan ekonomi di Indonesia. Dampak sosial yang dirasakan ini menciptakan kelompok miskin baru karena keterbatasan aktivitas masyarakat selama pandemi. Di sisi lain, dampak ekonomi terlihat pada melambatnya kegiatan ekonomi di Indonesia. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 meningkat 1,63 juta jiwa dibandingkan pada September 2019. Oleh karena itu, berdasarkan persentase penduduk miskin yang tercatat pada maret 2020 sebesar 9,78% dan 0,56% maka jumlah penduduk miskin saat ini adalah 26,42 jura jiwa. Karena dampak dari pandemi Covid-19, poin penduduk miskin meningkat dari September 2019 meningkat 0,37% ke Maret 2020 (BPS,2020).

Bentuk penanganan dari dampak covid-19 yang ditimbulkan, pemerintah menggunakan berbagai macam program dan stimulus untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2020 (Inpres 3/2020) tanggal 29 agustus 2020 sebagai bentuk percepatan penanggulangan kemiskinan di masa pandemi Covid-19 yaitu Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan didasari instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non

Tunai dan Peraturan Menteri Keuangan Republik, Indonesia, Nomor 40 / PMK.07 / 2020 tentang pengelolaan dana desa. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/ 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07 / Tentang Pengelolaan Dana Desa menjelaskan Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT-DD Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Bantuan ini salah satu kegiatan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan telah memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer kedaerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu.

Dalam Peraturan, Menteri Desa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan dan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, terdapat mekanisme dan metode penyaluran BLT-DD dimana dalam penyaluran BLT-DD dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non-tunai (*cashless*) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker. Monitoring dan evaluasi penyaluran BLT-DD dilaksanakan oleh Badan Permusyawarah Desa, Camat dan Inspektorat Kabupaten/Kota serta penanggung jawab penyaluran BLT-DD adalah Kepala Desa. Serta Instruksi Presiden, Nomor 3 tahun 2020 (Inpres 3/2020) tanggal 29 agustus 2020 dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana, Desa bagi, rumah tangga, sasaran (RTS).

Kabupaten Muna merupakan salah satu kabupaten tertinggal yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi *relative* rendah (0,1%) dan tingkat potensi pengembangan yang sangat rendah (Hidayat dkk, 213:7). Dengan adanya pandemi Covid-19 membuat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Muna mengalami penambahan dan menuntut pemerintah daerah untuk segera menanggulangi kemiskinan tersebut salah satunya dengan BLT-DD.

Dana Desa (DD) untuk Kabupaten Muna tahun 2021 mencapai Rp 124 miliar (DPMD Muna, 2021). Dana Desa tersebut dialokasikan ke 124 desa dan setiap desa akan mengelola sebesar Rp 1 miliar, sehingga anggaran yang digunakan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dimasing-masing desa/kelurahan di kabupaten Muna sebesar 300.000.000 atau 30% dari anggaran dana desa (DPMD Muna, 2021) Dalam memudahkan penyaluran bantuan sosial seperti PKH, BLT-DD, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Sembako, Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan jenis bantuan lainnya sebagai bentuk penanggulangan Kemiskinan, Kabupaten Muna menggunakan DTKS untuk memudahkan pendataan penerima bantuan.

Desa Wakorambu merupakan satu dari empat desa di Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna yang juga terkena dampak dari pandemi covid-19, desa yang memiliki luas wilayah 4.26 km<sup>2</sup> dan memiliki penduduk 1104 jiwa (BPS, 2020), dimana rata-rata masyarakatnya memiliki pekerjaan sebagai petani dan pedagang dalam memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari. Adanya pandemi covid-19 ini menyebabkan beberapa permasalahan bagi para pedagang di desa Wakorambu, seperti menurunnya daya beli masyarakat dan kurangnya permintaan pasar akan hasil pertanian dari masyarakat desa Wakorambu. Contoh harga kubis yang semula Rp. 3.000-5.000 per kilogram kini hanya Rp.1000-2.000 per kilogram dan harga cabai yang menurun semula Rp. 40.000-50.000 menjadi Rp.20.000 per kilogramnya (<https://sultra.litbang.pertanian.go.id/2021/11/9>).

Penduduk miskin adalah Desa Wakorambu yaitu sebanyak 50 % dari jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin terkecil yaitu Kelurahan Laiworu yaitu sebanyak 9% dari jumlah penduduk. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Wakorambu karena desa tersebut memiliki persentase jumlah penduduk lebih besar dibandingkan desa lain di Kecamatan Batalaiworu.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Walaupun jumlah masyarakat miskin telah terdaftar dalam DTKS dan dijadikan dasar data penerima bantuan sosial, namun masih ada saja masyarakat miskin yang tidak dapat bantuan sosial dari Pemerintah. Permasalahannya adalah Menurut Rido (2020), dalam pengimplementasian penyaluran BLT-DD, dimana yang seharusnya sesuai data yang berasal dari DTKS Kementerian Sosial tapi pada kenyataannya masih banyak warga yang belum mendapatkan BLT-DD, sehingga dipastikan penyalurannya tidak tepat sasaran. Musyawarah Bersama antar Kepala Desa dan BPD adalah sebanyak 56 rumah tangga dari jumlah rumah tangga diluar penerima PKH dan BPNT yang tercatat dalam DTKS, penerima PKH dan BPNT terdaftar berjumlah 45 rumah tangga serta jumlah rumah tangga miskin bukan penerima terdaftar DTKS tapi tidak menerima BLT-DD adalah sebanyak 17 orang, sehingga dengan begitu masih terdapat masyarakat miskin yang belum menerima BLT-DD.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan BLT-DD, yaitu pendataan calon penerima manfaat yang tidak merata, banyak keluhan-keluhan yang berdatangan dari masyarakat bahwa tidak terdata padahal masyarakat tersebut berhak untuk menerima bantuan (Sunaryo, 2020).

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ditulis sebagai karya ilmiah guna bahan perbandingan sekaligus pedoman penulis. Penelitian sebelumnya menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Pertama, Burhanuddin (2020) Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Nano Kabupaten Sumbawa barat yang menemukan hasil bahwa komunikasi yaitu sosialisasi program BLT dimana tingkat keberhasilan jika informasi sampai tingkat paling bawah dari sasaran tersebut. Namun yang jadi masalah yang dihadapi adalah SDM yang dimiliki pemerintah desa. Kedua, Insiya Meilin Sururoh (2021) Kontribusi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga di Desa Pancuran Gading Kabupaten Kampar dengan hasil

kontribusi dana BLT sangat membantu terhadap ketahanan ekonomi keluarga yaitu tempat tinggal, pendapatan, pembiayaan Pendidikan, dan jaminan kuangan. Ketiga, Dian Herdiana DKK (2021) Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang : Isu dan Tantangan. Yang menemukan bahwa isu dalam pelaksanaan kebijakan BLT-DD ada 3 Faktor terdiri dari kapasitas pemerintah, masyarakat sasaran dan mekanisme pelaksanaan. Dan tantangan dalam pelaksanaan yaitu kepada proporsionalitas anggaran desa dalam penanggulangan COVID-19. Keempat, Naida Arumdani, dkk (2021) Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Yang menemukan bahwa Dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19 khususnya dalam hal ekonomi, pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi untuk memberikan BLT-DD melalui mekanisme dan waktu yang telah ditentukan. Kelima, Ni Made Kiity Putri Suari dan Ni Putu Niti Suari Giri (2021) Analisis Terhadap Potensi Maladministrasi Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Dana Desa Selama Pandemi COVID-19. Ditemukan adanya potensi maladministrasi dalam pemberlakuan program BLT-DD diantaranya 1) tidak adanya peraturan mekanisme pengawasan yang jelas pada penyaluran BLT-DD, 2) tidak adanya kewenangan desa pada penentuan besaran bantuan sesuai kebutuhan desa, 3) jumlah desa yang belum adanya pejabat pengelola dokumentasi serta informasi dengan tujuan pemberi informasi.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan dan informan yang baru dan berbeda. Selain itu objek dan lokasi penelitian juga berbeda yakni terkait implementasi program penyaluran dan lokasi penelitian yakni di Desa Wakorambu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna yang akan memberikan hasil berbeda yang berguna untuk melengkapi penelitian yang telah ada sebelumnya.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dan upaya untuk mengoptimalkan implementasi program penyaluran langsung tunai dana desa pada masa pandemi covid-19 di Desa Wakorambu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dialami subyek penelitian dari masalah yang terjadi (Moleong, 2007). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi yang didapat dari sumber data primer dan sekunder melalui *purposive sampling* dengan narasumber Camat Batalaiworu (1 orang), Kepala Desa Wakorambu (1 orang), Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wakorambu (1 orang), Ketua BPD Desa Wakorambu (1 orang), Petugas penyaluran BLT-DD (1 orang), Masyarakat

kategori miskin penerima BLT-DD (4 orang), Masyarakat kategori Miskin bukan penerima BLT-DD (2 orang), Masyarakat kategori tidak miskin penerima BLT-DD (2 orang). Teknis analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Faktor pendukung dan penghambat implementasi program penyaluran langsung tunai dana desa pada masa pandemi covid-19 di desa Wakorambu kecamatan Batalaiworu kabupaten Muna provinsi Sulawesi Tenggara

Peneliti dalam menganalisis faktor pendukung dan penghambat konsep implementasi yang dikemukakan oleh David L. Weimer dan Aidan R. Vining yang terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu *Policy Logic* (Logika kebijakan yang terdiri tujuan kebijakan, dasar hukum), *Environment, Where the Policy is Operated* (Lingkungan dimana Kebijakan itu dijalankan yang terdiri dari lingkungan Lingkungan sosial, Lingkungan politik, Lingkungan Ekonomi, Lingkungan pertahanan dan keamanan dan Lingkungan geografi ), dan *The Ability of the Policy Implementer* (Kemampuan Pelaksana Kebijakan yang terdiri Kompetensi dan keterampilan penyalur, Prosedur Pelaksanaan).

##### 3.1.1 Faktor Pendukung

###### A. *Policy Logic*

###### a) Tujuan Kebijakan

Tujuan dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah masyarakat miskin, yang harus dilindungi akibat dari dampak sosial dan ekonomi yang terjadi pada masa pandemi Covid-19. Program BLT-DD merupakan upaya pemerintah untuk menghadapi krisis ekonomi yang dialami masyarakat pada masa pandemi Covid-19, Ketika pandemi Covid-19 membuat masyarakat menjadi terbatas dalam aksesibilitas terhadap faktor-faktor produksi masyarakat, Pendidikan, serta fasilitas penunjang lainnya.

###### b) Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /Pmk.07/ 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 /Pmk.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Kepala Desa Wakorambu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kepada Keluarga Miskin Tahun 2021

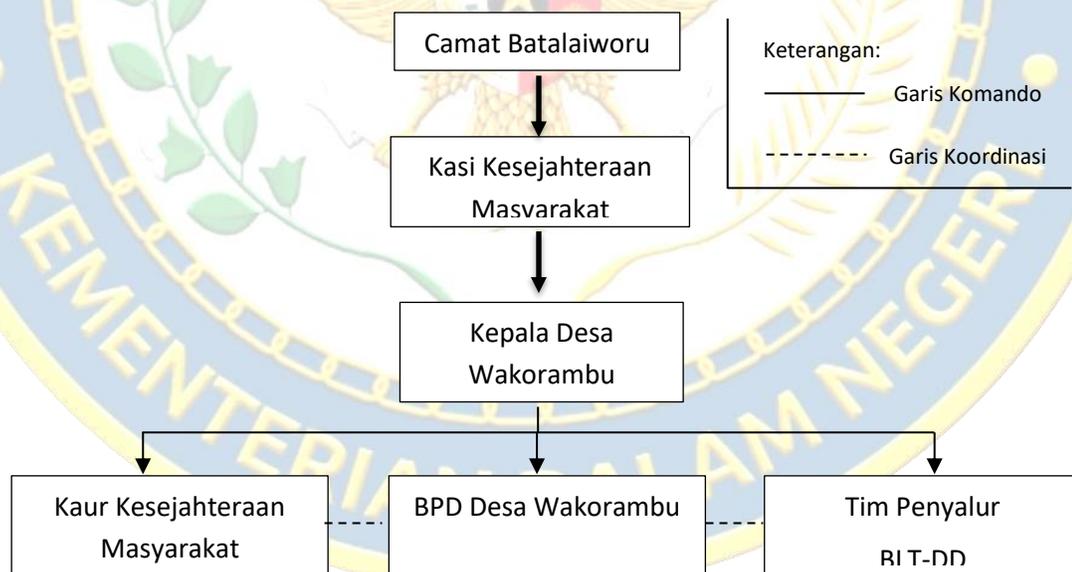
## B. Environment where the policy is operated

### a) Lingkungan sosial

Keberhasilan suatu kebijakan tidak terlepas dari dukungan interaksi sosial yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan kepada masyarakat sasaran kebijakan. Untuk mencapai hal itu, fokus dari subindikator lingkungan sosial ini ditujukan kepada kegiatan sosialisasi dan musyawarah desa khusus (Musdesus) oleh pemerintah desa Wakorambu dalam menyampaikan tujuan program BLT-DD dan penentuan calon KPM BLT-DD kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi oleh pemerintah desa Wakorambu dilakukan seminggu sebelum waktu pendataan penerima BLT-DD hal tersebut bertujuan agar masyarakat bisa lebih paham dahulu tentang program BLT-DD sebelum dilaksanakannya program tersebut, serta sasaran dari sosialisasi ini adalah masing-masing ketua RT/RW dengan harapan dari ketua RT/RW tersebut dapat menginformasikan Kembali kepada masyarakatnya mengenai hasil sosialisasi tersebut. Selain itu Dengan adanya Musdesus yang merekomendasikan nama-nama calon KPM BLT-DD dapat membantu kerjaan Tim pelaksana BLT-DD melakukan pendataan agar bisa tepat sasaran.

### b) Lingkungan Politik

Koordinasi pada pelaksanaan BLT-DD di Desa Wakorambu dilakukan secara vertikal yang artinya koordinasi dilakukan dengan pengarahannya serta penyatuan instruksi dari setiap atasan unit kerja dalam hal ini adalah Camat Batalaiworu selaku atasan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap unit-unit kerja kegiatan program BLT-DD di Desa Wakorambu. Tujuan diadakannya koordinasi ini demi penyamaan persepsi pelaksanaan program BLT-DD di tiap desa yang ada di Kecamatan Batalaiworu.



Gambar 1. Koordinasi Pelaksanaan BLT DD Desa Wakorambu  
Sumber: Kantor Desa Wakorambu, 2022

c) Lingkungan Ekonomi

Diketahui bahwa Desa Wakorambu dengan jumlah KPM sebanyak 56 kartu keluarga dengan anggaran BLT-DD adalah sebanyak Rp.201.600.000. hal tersebut merupakan sesuatu yang baik yang diterima oleh masyarakat dikarenakan dapat membantu bagi masyarakat tatkala kondisi pandemi Covid-19 ini yang membuat masyarakat kesulitan mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

d) Lingkungan pertahanan dan keamanan

Diketahui bahwa aparat desa dalam melaksanakan rangkaian kegiatan program BLT-DD ditemani Babinsa Desa Wakorambu agar terciptanya kondisi kegiatan yang selalu kondusif serta tertib demi kelancaran program tersebut.

e) Lingkungan Geografi

Diketahui bahwa untuk kondisi jalanan di Desa wakorambu masih bisa dilalui dengan baik oleh masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari dan bagi pelaksanaan BLT-DD, jika terdapat keluarga penerima manfaat BLT-DD yang belum bisa datang ke balai desa untuk mengambil bantuan tersebut, Petugas penyalur BLT-DD akan menghampiri ke rumah keluarga tersebut untuk memberikan bantuan sehingga dengan begitu program BLT-DD dapat tersalurkan dengan baik dan tepat kepada keluarga penerima manfaat BLT-DD. Sehingga tidak ditemukannya masalah bagi penerima manfaat untuk pergi ke balai desa demi mengambil uang BLT-DD.

### 3.1.2 Faktor Penghambat

#### C. *The ability of the policy implementer*

a) Kompetensi dan Keterampilan Pelaksana

Diketahui bahwa keterampilan dan kemampuan pelaksana BLT-DD masih kurang dalam hal pelayanan kepada masyarakat dengan ditunjukkan terhadap kurangnya keterampilan petugas dalam menggunakan laptop sehingga menyebabkan masyarakat harus menunggu lebih lama dalam mendapatkan BLT-DD.

b) Prosedur Pelaksanaan

Diketahui bahwa Dalam pelaksanaan pendataan tersebut terjadinya hambatan atau permasalahan yang dihadapi proses pelaksanaannya terkhusus pada pelaksanaan pendataan dan ketidaktepatan sasaran BLT-DD tersebut. masih ditemukannya masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan BLT-DD dan terdapatnya masyarakat bukan kategori miskin yang mendapatkan BLT-DD sehingga penyaluran dari BLT-DD di Desa Wakorambu masih belum tepat sasaran. dalam mencegah hal tersebut terulang kembali dipemberian BLT-DD ditahun berikutnya akan lebih difokuskan pada proses pendataan calon KPM BLT-DD agar BLT-DD tersebut dapat tepat sasaran.

### **3.2. Upaya untuk Mengoptimalkan Implementasi Program Penyaluran Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi covid-19 di Desa Wakorambu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna provinsi Sulawesi Tenggara**

#### **3.2.1 Meningkatkan Kompetensi dan keterampilan Pelaksana**

Dalam meningkatkan kompetensi dan keterampilan pelaksana program BLT-DD pemerintah desa memberikan pelatihan dan pembelajaran Komputer bagi Tim pelaksana BLT-DD dengan harapan agar pelayanan yang diberikan bisa lebih efektif dan efisien. pemerintah Desa Wakorambu melakukan kegiatan pemberian materi dan pembelajaran komputer selama satu hari kepada setiap tim pelaksana program BLT-DD dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan tim pelaksana serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam setiap proses bantuan tersebut. pemerintah Desa Wakorambu memberikan pelatihan dan pembelajaran tentang pengembangan website desa kepada Tim Pelaksana BLT-DD.

#### **3.2.2 Meningkatkan proses pendataan calon KPM program BLT-DD**

Demi meminimalisir kesalahan terhadap pendataan hingga penyaluran yang dilakukan pemerintah desa Wakoambu dalam menetapkan calon KPM BLT-DD, pemerintah desa membuat alur pendataan yang dapat dipedomi bagi setiap unit kerja pelaksana program BLT-DD Ketika turun ke lapangan langsung dalam melihat kondisi calon KPM BLLT-DD. Dengan melakukan *crosscheck* Kembali mengenai daftar penerima BLT-DD yang telah didata, jika data penerima BLT-DD tersebut tidak sesuai dengan keadaan dilapangan dengan kata lain yang bersangkutan ternyata keluarga tergolong mampu ataupun yang bersangkutan taraf kesejahteraanya telah meningkat atau membaik dari sebelumnya maka pemerintah desa mengeluarkan warga tersebut dari penerima BLT-DD dan mengganti ke warga yang lebih membutuhkan. Pemerintah Desa Wakorambu terus memperbaiki kesalahan yang telah terjadi sebelumnya dimulai dari proses pendataan hingga penyaluran agar kedepannya bisa lebih baik sehingga tujuan dari BLT-DD dapat tercapai serta penegasan dari pemerintah desa Wakorambu yang mengatakan bahwa tidak adanya unsur nepotisme di dalam seluruh rangkaian kegiatan program BLT-DD tersebut sehingga jika terjadi kesalahan hal tersebut merupakan murni kesalahan manusia tanpa adanya unsur kesengajaan.

### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Peneliti menemukan bahwa BLT DD merupakan bentuk penanggulangan dampak Covi-19 terhadap perekonomian masyarakat. Terutama pada masyarakat Wakaromu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna. Layaknya temuan Naifda Arumdani, dkk (2021) bahwa Dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19 khususnya dalam hal ekonomi, pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi untuk memberikan BLT-DD melalui mekanise dan waktu yang telah ditentukan (Armdani et al., 2021)

Dalam pelaksanaan penelitian ditemukan bahwa pada proses penyaluran yang menjadi faktor penghambat adalah keterampilan dari perangkat Desa Wakarumbu. Layaknya temuan Burhanuddin (2020) yakni keberhasilan dari komunikasi yaitu sosialisasi program BLT dimana tingkat keberhasilan jika informasi sampai tingkat paling bawah dari sasaran tersebut. Namun yang jadi masalah yang dihadapi adalah SDM yang dimiliki pemerintah desa (Burhanuddin, 2020)

Selain dari masalah pada aparat desa, peneliti menemukan bahwa data sasaran masyarakat penerima dan mekanisme pelaksanaan juga masih belum sepenuhnya sesuai. Hal tersebut dikarenakan pada Desa Wakorambu masih terdapat masyarakat miskin yang justru tidak mendapatkan bantuan. Layaknya temuan Dian Herdiana, dkk (2021) bahwa isu dalam pelaksanaan kebijakan BLT-DD ada 3 Faktor terdiri dari kapasitas pemerintah, masyarakat sasaran dan mekanisme pelaksanaan. Dan tantangan dalam pelaksanaan yaitu kepada proporsionalitas anggaran desa dalam penanggulangan COVID-19 (Herdiana et al., 2021).

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Faktor pendukung implementasi program penyaluran bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Wakorambu yaitu adanya kejelasan dari tujuan program BLT-DD, dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan BLT-DD, kegiatan sosialisasi program BLT-DD kepada masyarakat yang berjalan dengan baik, koordinasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, ketersediaan anggaran dalam menyalurkan program BLT-DD, lingkungan keamanan dan pertahanan yang kondusif, aman dan tertib, dan kondisi geografis jalanan di Desa Wakorambu yang baik dan mudah dilewati. Adapun faktor Penghambat implementasi program penyaluran bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Wakorambu yaitu keterampilan dan kemampuan dari pelaksana program yang masih belum optimal dan pelaksanaan pendataan calon KPM BLT-DD yang masih belum tepat sasaran. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan implementasi program penyaluran BLT-DD di Desa Wakorambu yaitu peningkatan kompetensi dan keterampilan pelaksana program BLT-DD dan peningkatan proses pendataan calon KPM program BLT-DD.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Serta penelitian hanya pada wilayah tertentu yang mudah dijangkau.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Bantuan Langsung tunai Dana Desa di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada camat Batalaiworu beserta jajaran, Kepala Desa Wakorambu beserta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

Hidayati, N. Irdayanti, Yessi, N. F. (2020). *IMPLEMENTASI PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PEKANBARU* Hidayati Nasrah , Irdayanti , Yessi Nesneri , Fitri

- Hidayat, W. O. Z., Oktaviani, R., & Falatehan, A. F. (2013). *DI KABUPATEN MUNA Strategies in Alleviating Poverty among Farmers by Developing Plantation Commodities in Muna Regency* PENDAHULUAN Latar Belakang Pembangunan daerah Kabupaten Muna merupakan bagian integrasi dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah. 5.
- Hidayati Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Abstrak PENDAHULUAN Perkembangan penyebaran Corona Virus Disease. 11(April), 119–138.
- Kumar, R. (2018). *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners*. Sage.
- Mahin, M. (2021). *PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA NANGA AMBALAU KECAMATAN AMBALAU*. FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 19(1). <https://doi.org/10.51826/fokus.v19i1.480>
- Nurwati, N. (2008). *Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*. Jurnal Kependudukan Padjadjaran, 10(1), 245387.
- Muna, B. (2019). *Kecamatan Batalaiworu Dalam Angka 2019* (Vol. 148). BPS Kabupaten Muna /BPS-Statistics of Muna Regency.
- Schnider, G. dan Ingram, M. L., (2017). *Implementation Theory and Practice, Toward a Third Generation*. USA: Scott, Foresman and Company Purwanto, Erwan, Agus Sulistyastuti, Dyah Ratih, 2015. Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gava Media.
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). *Policy Analysis: Concepts and Practice*, Boston: Longman

